

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk terbesar ke empat di dunia. Memiliki populasi penduduk yang sangat besar membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi dimasyarakat. Salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan sering kali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari.

Kemiskinan adalah permasalahan pokok yang dialami oleh sebagian besar Negara di dunia. Walaupun tidak dikatakan seluruhnya, dengan perbedaan tingkat dan jumlah orang miskin pada setiap Negara, hampir tidak ada satu Negara yang dapat terbebas dari masalah kemiskinan. Negara yang kaya dan maju di bidang sains dan industri juga mengalami kemiskinan meski jumlahnya tidak besar, kemiskinan merupakan masalah umum yang telah menjadi ancaman serta bencana bagi suatu Negara.

Menurut Mubyarto (2010), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Para ahli ilmu sosial berpendapat bahwa penyebab utama kemiskinan adalah sistem

ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang berangkutan. Namun, banyak ahli yang juga percaya bahwa kemiskinan bukanlah suatu gejala yang terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi. Kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi yang melibatkan hampir semua aspek dimiliki manusia dalam kehidupannya.

Menurut Maipita (2014), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, papan, dan obat-obatan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dari masa ke masa, kemiskinan ini merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan dan program yang khusus. Kesejahteraan negara adalah cita – cita luhur dari founding father kita. Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terbebas dari belenggu kemiskinan. di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama kita terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Purwanto dkk., 2014).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program bantuan sosial bersyarat di Indonesia yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2007. PKH bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini umumnya terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, seperti kehadiran anak di sekolah, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, dan imunisasi anak. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi dengan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai (Direktorat Jaminan Sosial & Sosial, 2021:7).

Pelaksanaan PKH melibatkan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping sosial yang bertugas untuk memastikan keluarga penerima manfaat memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pendamping ini juga membantu keluarga dalam memahami dan mengakses layanan publik lainnya yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain bantuan tunai, PKH juga menyediakan akses ke program pelatihan keterampilan untuk membantu keluarga meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, dengan harapan bahwa mereka dapat menjadi lebih mandiri secara finansial di masa depan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 3 menetapkan kriteria keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH). Kriteria ini mencakup keluarga miskin

atau rentan miskin yang memiliki komponen kesejahteraan tertentu, seperti ibu hamil atau menyusui, anak usia dini, anak usia sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018).

Selain mendorong keluarga penerima manfaat untuk mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) juga memberikan pendampingan yang berkelanjutan untuk membantu mereka memanfaatkan program-program tambahan yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Pendampingan ini mencakup bantuan dalam mengakses pelatihan keterampilan, peluang usaha, dan program pengembangan ekonomi lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian finansial keluarga penerima manfaat.

Peran pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting dan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan layanan dasar hingga pelaksanaan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, yang merupakan fondasi utama kesejahteraan.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Pengertian ini menekankan bahwa

kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kesejahteraan secara menyeluruh yang melibatkan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan hubungan sosial (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dan mengarahkan berbagai sumber daya negara demi kesejahteraan rakyat. Tugas ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang mencakup sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melaksanakan program Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH yang diatur oleh subdirektorat bantuan sosial, dengan dukungan dari subdirektorat terkait lainnya. Program ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, yang menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial ini merupakan bagian integral dari upaya penanggulangan kemiskinan yang mencakup berbagai aspek yaitu:

1. Perlindungan sosial
2. Jaminan sosial
3. Pemberdayaan sosial
4. Rehabilitasi sosial, dan
5. Pelayanan dasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tenga sebanyak 15,6 ribu jiwa dengan persentase 5,8% pada tahun 2024. Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang ada, terkhusus masalah kemiskinan pemerintah daerah melalui Dinas Kesejahteraan Sosial menggunakan program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada yakni adanya Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, salah satu desa yang ada di Kecamatan Barabai yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Desa Mandingin dengan jumlah penduduk desa yang tergolong banyak, dengan permasalahan yang tidak lepas dari kemiskinan. Masyarakat di desa Mandingin masih banyak yang kurang mampu karena mata pencarian terbesar masyarakat disini hanya berdagang, bertani dan berkebun.

Adanya Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat mengurangi maupun mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Mandingin, PKH yang dilakukan di Desa Mandingin lama berupa adanya pemberian uang dengan menunjukkan kartu keluarga sejahtera, masyarakat yang mendapatkan PKH berdasarkan observasi awal peneliti adalah 84 orang selaku penerima manfaat.

Beberapa kriteria syarat untuk menjadi penerima PKH meliputi (Direktorat Jaminan Sosial & Sosial, 2021):

1. Kriteria komponen kesehatan
 - a. Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan.
 - b. Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, maksimal 2 anak.

2. Kriteria komponen Pendidikan

- a. Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) sederajat.
- b. Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat.
- c. Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau sederajat.
- d. Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Bantuan yang akan diterima oleh peserta PKH terdiri dari bantuan tunai reguler dan bantuan komponen untuk setiap anggota keluarga, seperti ibu hamil, anak usia dini, dan lainnya. Program ini juga memiliki komponen kesehatan dan pendidikan, di mana peserta akan menerima bantuan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tingkat kehadiran sekolah, pemeriksaan kesehatan, dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil.

Kemudian metode penyaluran Program Keluarga Harapan di Desa Mandingin merupakan non tunai untuk nominalnya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan ada yang untuk anak sd, kemudian penyalurannya ini per tiga bulan sekali. Jumlah bantuan untuk komponen Pendidikan yaitu orang tua yang anaknya masuk pada kategori SD Rp. 225.000, SMP Rp. 375.000 dan SMA Rp. 500.000. kemudian pada lansia berjumlah 600rb. Namun hal ini penyaluran Program PKH ini masih belum merata kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan waktu pembagian yang belum ada kejelasan.

Adapun fenomena permasalahan berikut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program yang belum merata

Pelaksanaan program Keluarga Harapan di Desa Mandingin Kecamatan Barabai berdasarkan observasi dilapangan terlihat bahwa masih belum merata program tersebut terealisasi kepada masyarakat miskin yang harusnya termasuk dalam penerima manfaat Program Keluarga Harapan ini.

2. Belum maksimalnya pencapaian tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan umum dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan dengan cara memberikan bantuan sosial yang bersifat langsung dan terarah. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga melalui dukungan finansial serta mendorong perilaku yang mendukung peningkatan kualitas hidup, seperti akses pendidikan bagi anak-anak dan pemeliharaan kesehatan. Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandingin tujuan program tersebut belum tercapai secara maksimal, hal ini terlihat pada masyarakat penerima manfaat tidak terlalu berkembang dalam kualitas ekonomi mereka. mereka mulai terbiasa dengan adanya bantuan sehingga enggan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka sendiri.

3. Belum terciptanya kemandirian oleh keluarga penerima manfaat

Keluarga penerima manfaat di Desa Mandingin masih mengharapkan bantuan dari adanya Program PKH. Mereka cenderung bergantung jangka panjang karena rendahnya kesadaran. Kemudian minimnya pengelolaan

sumber daya akibatnya peningkatan ekonomi jangka pendek tidak berlanjut ke kemandirian.

4. Ketidakjelasan waktu penerima program PKH dari pusat

Ketidakjelasan waktu penerima program PKH kadang dialami oleh penerima manfaat seperti menunda penyaluran yang harusnya pada bulan oktober malah mundur hingga bulan desember.

Berdasarkan fenomena permasalahan diatas dalam penelitian akan melihat efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Mandingin dengan menggunakan teori efektivitas program dari Budiani dalam (Pertiwi & Nurcahyanto, 2017). Efektivitas program Menurut Budiani adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Efektivitas program juga suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana suatu kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi tersebut. pada efektivitas program budiani terdapat empat variabel untuk melihat efektivitas suatu program yaitu ketepatan sasaran, tujuan program, sosialisasi program, dan pemantauan program.

Melihat hal ini peneliti tertarik untuk mempelajari, menganalisis dan menelaah mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten HST untuk dijadikan topik pembahasan dalam skripsi dengan judul “**Efektivitas**

Program Keluarga Harapan di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas fokus penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandingin kemudian dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat khususnya penerima manfaat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program tersebut dengan menggunakan teori efektivitas program menurut budiani yang meliputi ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, proses pelaksanaan yang benar, kepuasan penerima manfaat, efisiensi sumber daya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang ada dalam penelitian ini:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tantangan dan dinamika dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan terkhusus dalam Program Keluarga Harapan
- b. Kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program pengentasan kemiskinan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) atau program serupa.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancangan program sosial yang lebih efektif dan berdampak.